

# **IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI FAKTOR INPUT SEBAGAI VARIABEL PEMBENTUK INDEKS DAYA SAING DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016**

Oleh:

**Pahrul Fauzi<sup>1</sup> & Mahardhika Cipta Raharja<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, IAIN Purwokerto

## **Abstrak**

Era globalisasi menuntut setiap daerah (kabupaten-kota, provinsi) untuk dapat menginventarisasi sekaligus melakukan upaya dalam mengoptimalkan semua sumber daya (resources) yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan daya saing daerah yang bersangkutan. Penelitian ini melakukan analisis guna inventarisasi sekaligus klasifikasi faktor-faktor input pembentuk indeks daya saing daerah yang ada di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode wawancara yang dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2016. Analisis Hierarki Proses (AHP) menjadi alat analisis utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis hierarki proses (AHP) diketahui bahwa faktor input pada level pertama, urutan prioritasnya adalah faktor SDM dan Ketenagakerjaan (24,75%). Pada level kedua yaitu faktor Konektivitas Terintegrasi (20,19%), disusul dengan faktor Iklim Usaha Produktif (18,89%). Faktor Kelembagaan Daerah dan faktor Perekonomian Daerah berada pada urutan prioritas keempat dan kelima dengan persentase sebesar 14,46% dan 11,16% yang disusul oleh faktor keenam yaitu faktor Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan persentase sebesar 10,54%.

Kata Kunci: Daya Saing Daerah, Analytical Hierachy Process, AHP, Kabupaten Cirebon.

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2014 *World Economic Forum* (WEF) melakukan kajian untuk menentukan peringkat daya saing dari 144 negara. Kajian yang dipublikasikan dalam *Global Competitiveness Report* tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-34, naik empat peringkat dari kajian tahun sebelumnya. Meski meningkat, posisi Indonesia masih berada di bawah negara-negara asia tenggara lain seperti Singapura yang berada di urutan ke-2, Malaysia di urutan ke-20, bahkan Thailand di peringkat ke-31 (World Economic Forum, 2014). Berdasarkan kajian tersebut tentu Indonesia masih harus terus berbenah untuk mampu terus bersaing.

Berdasarkan perencanaan pembangunan pemerintah, salah satu sasaran pembangunan yang dicantumkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing daerah. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari tuntutan jaman pada era globalisasi yang tidak akan lepas dari persaingan pada setiap bidang kehidupan. Berlandaskan hal tersebut, setiap daerah (kabupaten-kota atau provinsi) dituntut untuk mampu menyesuaikan diri pada iklim tersebut sehingga secara nasional dapat tercipta daya saing yang kompetitif.

Pada pelaksanaannya, pembangunan daerah semakin dinamis, berdasar hal itu tentu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi yang terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan daerah juga diarahkan agar terciptanya kemandirian daerah, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi, tetapi juga kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba meneliti mengenai faktor-faktor input pembentuk daya saing daerah. Adapun daerah yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu wilayah unggulan di Provinsi Jawa Barat yang diproyeksikan akan menjadi salah satu daerah metropolitan (RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018) Kabupaten Cirebon tentu harus mampu melakukan identifikasi potensi yang dimilikinya sebagai upaya meningkatkan daya saing daerahnya.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini mencoba melakukan identifikasi sekaligus klasifikasi faktor input sebagai variabel pembentuk Indeks Daya Saing daerah di Kabupaten Cirebon. Variabel dalam kajian/penelitian ini dipetakan berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam membangun daya saing daerah. Selanjutnya diklasifikasikan dalam bentuk model logika input-output, yaitu faktor input dan faktor output pembentuk daya saing daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada bulan Oktober s/d Desember 2016. Untuk melakukan analisis yang lebih spesifik, penelitian ini dibatasi hanya untuk melakukan analisis pada faktor input sebagai variabel pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon.

## Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk kajian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari sumber (responden) yang telah ditentukan sebelumnya melalui metode *purposive sampling*. Pemilihan metode sampling ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan penilaian yang obyektif dari responden yang dinilai memiliki kompetensi memadai untuk memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi responden untuk melakukan *deep interview* berdasarkan panduan pertanyaan (kuesioner) yang telah dipersiapkan, maupun mengirimkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel tersebut.

## Definisi Operasional

Variabel ditetapkan dengan mendekati pada sasaran strategis dalam membangun daya saing daerah. Indikator kinerja apa yang dapat merefleksikan sasaran strategis yang ingin dicapai. Secara konsep, kinerja ditentukan terlebih dahulu lalu kemudian memilih indikator yang sesuai. Pemilihan indikator memperhatikan ketersediaan data dan pertama-tama diarahkan pada data kuantitatif (data sekunder) yang ada. Apabila data sekunder tidak diperoleh maka menggunakan data kualitatif (data primer) dari responden melalui kuesioner yang disampaikan. Dengan demikian, variabel yang dimaksud dalam kajian atau penelitian ini adalah indikator kinerja yang mewakili sasaran strategis untuk membangun daya saing daerah yang menunjukkan besarnya kemampuan suatu daerah dalam mencapainya.

Bobot masing-masing variabel disusun secara bertingkat atau gradual. Level pertama merupakan sasaran strategis, dan level kedua adalah kinerja-kinerja yang menggambarkan masing-masing sasaran strategis tersebut. Tingkatan tersebut disusun untuk memudahkan keputusan memilih prioritas dari rangkaian strategi yang ada berdasarkan kemampuan yang dimiliki (kinerja). Analisa yang demikian disebut Proses Analitis Hierarki (*Analytical Hierachy Process*) atau lebih dikenal dengan metode AHP. Hierarki dari rangkaian sasaran strategis dan kinerja digambarkan dalam bagan berikut:

**Tabel 1**  
**Hierarki Faktor Input**

NO	INPUT	
	LEVEL I	LEVEL II
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Mendorong aktivitas perekonomian daerah	a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah b. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah c. Meningkatkan investasi daerah
2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan	a. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan b. Meningkatkan derajat kesehatan c. Meningkatkan kualitas pendidikan serta kompetensi teknologi & keterampilan
3.	Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi)	a. Penyederhanaan dan harmonisasi berbagai peraturan b. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan dan non perizinan

NO	INPUT	
	LEVEL I	LEVEL II
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Kemudahan dalam proses pembebasan dan perolehan lahan</li> <li>d. Menciptakan keamanan yang terkendali</li> </ul>
4.	Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar</li> <li>b. Ketersediaan listrik yang memadai dan menjadi insentif untuk membangun industri serta memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi</li> <li>c. Ketersediaan sarana telekomunikasi untuk memudahkan arus informasi dengan lebih luas &amp; cepat</li> </ul>
5.	Meningkatkan aktivitas perbankan dan lembaga keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan jumlah kantor bank</li> <li>b. Meningkatkan jumlah kantor non bank (perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi, bursa efek/pasar modal, pegadaian, dll)</li> <li>c. Menambah jenis-jenis layanan perbankan dan lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> </ul>
6.	Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan daerah (berdasarkan pendekatan teori kelembagaan, LaPorta, 1999)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong menurunnya tingkat korupsi daerah</li> <li>b. Dukungan dan bantuan riil pemerintah daerah dalam mendorong inovasi masyarakat</li> <li>c. Menurunkan waktu tunggu pengurusan berkas administrasi kependudukan dan bisnis</li> <li>d. Kepastian hukum (termasuk perlindungan hukum) atas kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat swasta</li> <li>e. Kualitas demokrasi melalui kebebasan warga untuk berpartisipasi dalam pemilu yang jujur terbuka dan tanpa intervensi pihak birokrasi</li> </ul>

Tabel di atas menunjukkan hierarki faktor input yaitu lima sasaran strategis beserta indikator kinerja yang mendukungnya. Model penilaian tersebut diaplikasikan pada kuesioner penelitian dengan membandingkan faktor input yang menjadi variabel pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon baik pada level pertama maupun level kedua. Pilihan sasaran strategis mana yang lebih prioritas dibanding yang lain didasarkan atas persepsi dari responden yang telah ditentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

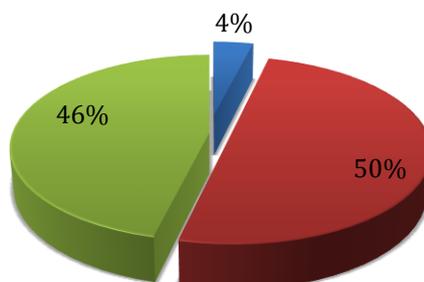
**Tabel 2**  
**Daftar Responden Penelitian**

No	Unsur Responden Penelitian	Person
Unsur Pemerintahan		
1	Bappeda	1
2	Sekretariat Daerah	1
3	Dinas Pendapatan (Keuangan)	1
4	Dinas Pariwisata	1
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan	1
6	Dinas Koperasi dan UMKM	1
7	Dinas Cipta Karya & Tata Ruang	1
8	Dinas Pertanian	1
9	BPPT	1
10	Dinas Pertanian	1
11	Dinas Perikanan	1
12	HIPMI Cirebon	1
13	Kadin DAERAH	1
14	Dinas Bina Marga	1
Unsur Akademisi		
14	Unswagati	1
15	UMC	1
16	IAIN Syeh Nurjati	1
17	STIE	1
Unsur Pengusaha (Swasta)		
18	Kuliner	2
19	Batik	2
20	Rotan	2
21	Perwakilan Perbankan	2
Jumlah		26

Sumber: Data Primer diolah.

**Gambar 1**  
**Karakteristik Responden Berdasar Pendidikan**

■ DIII/Akademi/SMA ■ S1 ■ S2

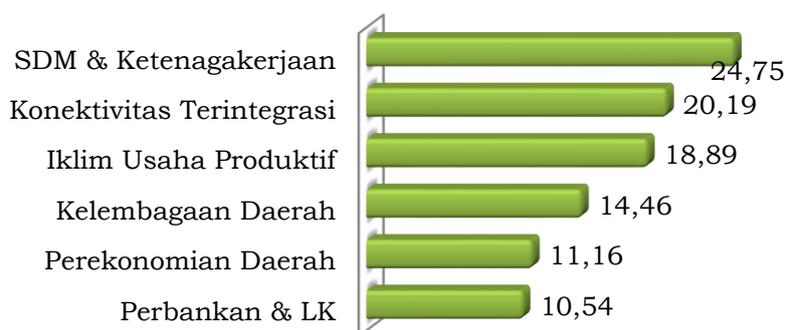


### Perhitungan Bobot Pengukuran

Untuk menghitung bobot faktor input pada pengukuran indeks daya saing Kabupaten Cirebon digunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty pada tahun 1970-an. Pemilihan alat analisis ini didasarkan pertimbangan bahwa AHP merupakan salah satu alat atau model pengambilan keputusan dengan input utama adalah persepsi manusia. AHP merupakan salah satu metode yang memecah suatu masalah kompleks ke dalam kelompok-kelompok secara hierarki. Dengan AHP pembobotan suatu faktor atau variabel dapat dilakukan sesuai dengan persepsi manusia sehingga diharapkan mampu menggambarkan kondisi yang senyatanya.

### Hasil Analisis Hierarki Proses Level Pertama

Faktor input pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon pada level pertama berupa sasaran strategis yang terdiri dari enam faktor yaitu: Mendorong aktivitas perekonomian daerah; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan; Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi); Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya; Meningkatkan aktivitas perbankan dan lembaga keuangan; Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan daerah (berdasarkan pendekatan teori kelembagaan). Hasil perhitungan Analisis Hierarki Proses pada level pertama ini seperti dijelaskan pada gambar 2 sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Hasil Perhitungan AHP Level Pertama**

Berdasarkan gambar 2 yang merupakan hasil analisis pada level pertama diketahui bahwa faktor Sumber daya manusia (SDM) dan Ketenagakerjaan menjadi prioritas pertama dengan persentase sebesar 32,68%. Hal tersebut memberikan arti bahwa pada level pertama responden menilai bahwa perbaikan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan menjadi prioritas pertama sasaran strategis dari faktor input yang membentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon. Pada prioritas kedua, yaitu faktor Membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Faktor prioritas kedua ini juga merupakan hal penting yang sangat menunjang pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon.

Kedua hal tersebut senada dengan tiga strategi utama pembangunan perekonomian nasional atau yang pada era Presiden SBY dikenal dengan istilah MP3EI (Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Perekonomian Indonesia) yaitu mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memaksimalkan bonus demografi yang sedang dialami oleh Indonesia. Selain itu menurut Krisnamurthi (2002) pengembangan kapasitas sumber daya manusia meliputi: (1.) kelembagaan; (2.) pendanaan; dan (3.) pelayanan, di samping itu masalah internal yang harus dihadapi adalah persoalan efisiensi, keterbatasan, dan keterampilan dari sumber daya manusia itu sendiri.

Menciptakan lingkungan usaha produktif yang dapat menarik minat dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha (termasuk investasi) menjadi faktor prioritas ke tiga pada faktor input pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon dengan persentase sebesar 18,89%. Lingkungan usaha produktif, yang di dalamnya termasuk pengembangan investasi, dirasa menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah yang secara langsung memberikan dampak terhadap daya saing daerah. Pemikiran ekonom-ekonom modern dunia seperti Joseph Schumpeter (dalam bukunya *Capitalism, Socialism, and Democracy* tahun 1943) menitikberatkan faktor investasi dalam laju pembangunan ekonomi. Dengan adanya investasi berarti akan menambah kapasitas produksi sehingga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki *multiplier effect* dan dapat menciptakan *growth accelerator*. Investasi yang ditanamkan mampu menarik investasi berikutnya sehingga menghasilkan tambahan berganda pada hasil produksi dan pendapatan masyarakat. Begitupun dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya akan menambah kemampuan daya beli (*aggregate demand*), kemudian peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan produksi dan investasi.

Sementara pada prioritas keempat dengan persentase sebesar 14,46% yaitu meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan daerah. Sedangkan faktor Mendorong aktivitas perekonomian daerah berada pada prioritas kelima dengan persentase sebesar 11,16%, disusul dengan faktor Meningkatkan aktivitas perbankan dan lembaga keuangan pada posisi keenam dengan persentase sebesar 10,54%. Ketiga faktor terakhir tersebut tentunya mempunyai peran sebagai penunjang dalam rangka menguatkan faktor input pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon.

### Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua

Pada level kedua perhitungan Analisis Hierarki Proses dilakukan untuk mengetahui bobot dari masing-masing variabel pada faktor input pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon. Faktor Perekonomian Daerah terdiri dari tiga variabel yaitu: Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, dan Meningkatkan Investasi Daerah.

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Perekonomian Daerah**

Indikator	Persentase	Prioritas
Optimalisasi PAD	32,51	2
Peningkatan Kapasitas Fiskal	27,87	3
Meningkatkan Investasi Daerah	39,62	1

Sumber: Data primer diolah

Seperti dijelaskan pada tabel 3, variabel Meningkatkan investasi daerah menjadi prioritas pertama dengan persentase sebesar 39,62%. Sedangkan pada prioritas kedua dan ketiga yaitu variabel Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Peningkatan Kapasitas Fiskal dengan persentase 32,51% dan 27,87%. Sedangkan pada tabel 4 merupakan perhitungan Analisis Hierarki Proses level kedua pada faktor SDM & Ketenagakerjaan yang terdiri dari tiga variabel. Prioritas pertama ditempati variabel Meningkatkan Kualitas Pendidikan serta kompetensi teknologi & keterampilan dengan persentase sebesar 34,43%, disusul variabel Meningkatkan derajat kesehatan di peringkat kedua dengan 33,98%. Sedangkan variabel peningkatan pendidikan dan keterampilan menjadi prioritas ketiga dengan persentase 31,59%.

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor SDM & Ketenagakerjaan**

<b>Indikator</b>	<b>Persentase</b>	<b>Prioritas</b>
Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan	31,59	3
Meningkatkan Derajat Kesehatan	33,98	2
Meningkatkan Kualitas Pendidikan serta kompetensi teknologi & keterampilan	34,43	1

Sumber: Data primer diolah

Pada tabel 5 merupakan hasil perhitungan Analisis Hierarki Proses level kedua pada faktor Menciptakan Usaha Produktif yang dapat menarik minat dunia usaha yang terdiri dari empat variabel. Pada prioritas pertama dengan persentase sebesar 29,94% variabel keamanan dinilai responden menjadi variabel paling perlu diprioritaskan pada faktor Menciptakan Lingkungan Usaha yang Produktif sebagai faktor input pembentuk daya saing daerah di Kabupaten Cirebon. Keamanan yang terkendali dinilai responden sebagai tolok ukur utama apakah suatu daerah mempunyai kelayakan untuk dijadikan tempat untuk menanamkan investasinya. Pada prioritas kedua, variabel Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu, dengan persentase sebesar 28,34%. Sedangkan pada prioritas ketiga dan keempat yaitu variabel Harmonisasi Peraturan dan Kemudahan dalam proses pembebasan lahan dengan persentase masing-masing sebesar 22,80% dan 18,91%.

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua**  
**Faktor Lingkungan Usaha Produktif**

<b>Indikator</b>	<b>Persentase</b>	<b>Prioritas</b>
Harmonisasi Peraturan	22,80	3
Pelayanan Perizinan Terpadu	28,34	2
Pembebasan Lahan	18,91	4
Keamanan	29,94	1

Sumber: Data primer diolah

Sementara pada tabel 6 merupakan hasil perhitungan Analisis Hirarki Proses (AHP) pada level dua yaitu faktor Membangun Konektivitas yang terintegrasi yang terdiri dari tiga variabel. Pada prioritas pertama yaitu variabel Ketersediaan infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus barang, jasa, manusia dan menjadi penghubung yang efisien antara

sumber bahan baku, pusat produksi dan pasar, dengan persentase sebesar 36,99%. Pada prioritas kedua yaitu variabel ketersediaan sumber tenaga listrik sebesar 35,69%, yang disusul pada peringkat ketiga yaitu variabel Ketersediaan sarana telekomunikasi dengan persentase sebesar 27,33%.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Membangun Konektivitas Terintegrasi**

<b>Indikator</b>	<b>Persentase</b>	<b>Prioritas</b>
Infrastruktur	36,99	1
Listrik	35,69	2
Sarana Komunikasi	27,33	3

Sumber: Data primer diolah

Tabel 7 menjelaskan mengenai hasil perhitungan Analisis Hierarki Proses (AHP) level kedua faktor Meningkatkan aktivitas Perbankan dan lembaga keuangan yang terdiri dari tiga variabel. Pada prioritas peringkat pertama yaitu variabel menambah jenis layanan perbankan dan lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan persentase sebesar 36,91%. Sementara pada prioritas kedua dan ketiga yaitu variabel menambah jumlah kantor bank dan juga kantor non bank dengan persentase sebesar 36,36% dan 26,74%. Peran perbankan dirasa cukup penting dalam menunjang perkembangan perekonomian di Kabupaten Cirebon yang secara langsung juga berpengaruh terhadap faktor pembentuk daya saing daerahnya.

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Meningkatkan Aktivitas Perbankan dan Lembaga Keuangan**

<b>Indikator</b>	<b>Persentase</b>	<b>Prioritas</b>
Meningkatkan Jumlah Kantor Bank	36,36	2
Meningkatkan Jumlah Kantor Non Bank	26,74	3
Menambah Jenis Layanan BLK	36,91	1

Sumber: Data primer diolah

Faktor input terakhir (keenam) pembentuk daya saing daerah Kabupaten Cirebon adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Daerah yang terdiri dari lima variabel. Peran tata kelola kelembagaan daerah dirasa cukup penting dan signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan daerah, termasuk di dalamnya sebagai faktor penunjang untuk meningkatkan daya saing daerah.

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Hierarki Proses Level Kedua Faktor Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Daerah**

Indikator	Persentase	Prioritas
Menurunkan tingkat korupsi	27,87	1
Dukungan riil pemerintah untuk mendorong inovasi	20,83	3
Memangkas waktu pengurusan berkas administrasi kependudukan & bisnis	17,83	4
Kepastian hukum	22,72	2
Meningkatkan kualitas demokrasi	11,19	5

Sumber: Data primer diolah

Seperti dijelaskan pada tabel 8 variabel yang menjadi prioritas pertama pada Faktor Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Daerah adalah variabel menurunkan tingkat korupsi dengan persentase sebesar 27,87%. Pada peringkat kedua yaitu variabel kepastian hukum dengan persentase sebesar 22,72%, sedangkan variabel Dukungan riil pemerintah untuk mendorong inovasi masyarakat pada urutan ketiga dengan persentase 20,83%. Pada prioritas keempat dan kelima yaitu memangkas waktu pengurusan berkas dan meningkatkan kualitas demokrasi dengan persentase sebesar 17,83% dan 11,19%.

Pada tabel 9 merupakan rekapitulasi perhitungan Analisis Hierarki Proses (AHP) faktor input pembentuk daya tarik daya saing daerah Kabupaten Cirebon. Pada level pertama prioritas pertama sampai ke enam secara berturut-turut adalah: SDM dan Ketenagakerjaan, Konektivitas Terintegrasi, Meningkatkan Iklim Usaha Produktif, Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan, Perekonomian Daerah, dan Meningkatkan Aktivitas Bank dan Lembaga Keuangan.

**Tabel 9**  
**Hierarki Faktor dan Variabel Faktor Input Pembentuk Daya Saing Daerah Kabupaten Cirebon**

Level Pertama (Kriteria)			Level Kedua (Indikator)		
Faktor	Bobot (%)	Prioritas	Indikator	Bobot (%)	Prioritas
Perekonomian Daerah	11,16	P5	Optimalisasi PAD	3,63	P14
			Meningkatkan Kapasitas Fiskal	3,11	P17
			Meningkatkan Investasi	4,42	P9
SDM & Ketenagakerjaan	24,75	P1	Pendidikan & Keterampilan	7,82	P3
			Meningkatkan Derajat Kesehatan	8,41	P2
			Meningkatkan Kualitas & Kompetensi Pendidikan-keterampilan	8,52	P1
Meningkatkan Iklim Usaha Produktif	18,89	P3	Harmonisasi Peraturan	4,31	P10
			Pelayanan Perizinan Terpadu	5,35	P8
			Kemudahan Pembebasan Lahan	3,57	P15
			Keamanan	5,66	P6
Menciptakan Konektivitas Terintegrasi	20,19	P2	Ketersediaan Infrastruktur	7,47	P4
			Ketersediaan Energi Listrik	7,21	P5
			Ketersediaan Sarana Telekomunikasi	5,52	P7

Level Pertama (Kriteria)			Level Kedua (Indikator)		
Faktor	Bobot (%)	Prioritas	Indikator	Bobot (%)	Prioritas
Meningkatkan Aktivitas Bank & Lemb. Keuangan	10,54	P6	Menambah Jumlah Kantor Bank	3,83	P13
			Menambah Jumlah Kantor Non Bank	2,82	P19
			Menambah Jumlah Pelayanan	3,89	P12
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Daerah	14,46	P4	Mendorong Menurunnya Tingkat Korupsi	4,03	P11
			Mendorong Inovasi Masyarakat	3,01	P18
			Memangkas Waktu Pengurusan Berkas Kependudukan & Bisnis	2,51	P20
			Kepastian Hukum	3,29	P16
			Meningkatkan Kualitas Demokrasi	1,62	P21
Jumlah				100,00	

Sumber: Data primer diolah

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis hierarki proses pada level pertama diketahui bahwa prioritas pertama yang perlu diutamakan sebagai faktor input pembentuk daya saing daerah Kabupaten Cirebon adalah faktor SDM dan Ketenagakerjaan dengan persentase sebesar 24,75%.
2. Pada level kedua yaitu faktor Konektivitas Terintegrasi (20,19%), disusul dengan faktor Iklim Usaha Produktif (18,89%). Faktor Kelembagaan Daerah dan Faktor Perekonomian Daerah berada pada urutan prioritas ke empat dan ke lima dengan persentase sebesar 14,46% dan 11,16% yang disusul oleh faktor kelima yaitu faktor Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan persentase sebesar 10,54%.

Kemudian setelah disimpulkan, penelitian ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas (pendidikan dan keterampilan) dari sumber daya manusia dan ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas secara menyeluruh.
2. Menyediakan dan melakukan pemerataan fasilitas infrastruktur fisik berupa berbagai instalasi dan kemudahan dasar (terutama sistem transportasi, komunikasi, dan listrik), yang diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian dan memperlancar mobilitas, sehingga tercapai konektivitas secara terintegrasi.
3. Mewujudkan kondisi hubungan timbal balik sosial politik yang kondusif bagi iklim investasi dan iklim usaha yang meliputi jaminan keamanan, stabilitas sosial politik, dan nilai-nilai budaya masyarakat yang mencerminkan keterbukaan terhadap masuknya dunia usaha dan investasi.
4. Mendorong pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menyediakan fasilitas pendukung jasa

perekonomian seperti ketersediaan dan aksesibilitas dunia usaha terhadap dunia perbankan

5. Adanya penguatan fungsi kelembagaan untuk memberikan jaminan pada kepastian hukum, penggunaan keuangan daerah untuk alokasi kemudahan sistem pelayanan perizinan, peningkatan kemampuan aparatur & sistem pelayanan, dan produk peraturan dan kebijakan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Piter dkk. 2002. *Daya Saing Wilayah : Konsep dan Pengukurannya diIndonesia*. Pusat pendidikan dan studi kebanksentalan Bank IndonesiaYogyakarta. BPFE. Yogyakarta.
- Cho, Dong-Sung & Hwy-Chang Moon. 2003. *From Adam Smith To Michael Porter (Evolusi Teori Daya Saing)*. Salemba Empat.Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Kajian Atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Laporan Penelitian.
- Krisnamurthi, Bayu. 2002. *RUU Keuangan Mikro: Rancangan Keberpihakan Terhadap Ekonomi Rakyat*.
- Millah, Anita Nur. 2013. *Analisis Daya Saing Daerah di Jawa Tengah (Studi Kasus: Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal Tahun 2009-2011)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2012. *Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013*. Sumber: <http://rocana.kemenperin.go.id/index.php/download/category/36-2012?download=343%3A10-p-p-pp>.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Porter, Michael E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. London: The. Macmillan Press Ltd.
- World Bank Institute, 2001. *City Strategy to Reduce Urban Proverty Trough Local Economic Development: City Strategy and Governance*, IBRD.
- Saaty, Thomas L. 1986. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Edisi terjemahan Bahasa Indonesia*. Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.